



Peningkatan Kapasitas LKK Tidak Ikut Tertunda

BANTUL - Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang efisiensi anggaran membuat sejumlah pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah diminta untuk ditunda. Tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Instruksi ini pun turut dikeluarkan lewat Surat Edaran (SE) Nomor B/900.1.12/01070/BPKPAD.

SE yang ditandatangani Sekda Bantul Agus Budiraharja tersebut mengimbau untuk menunda kegiatan perjalanan dinas, seremonial, kajian, sosialisasi, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau *focus group discussion*. Penundaan berlaku sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Namun hal ini tidak berlaku pada program pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKK) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul. "PIK (pagu indikatif kapanewon) tempat kami cuma untuk peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMK), yandu, RT," ujar Kepala DPMK Bantul Sri Nuryanti kemarin (25/2).

Dia menyebut, peningkatan kapasitas LKK merupakan bagian dari so-

sialisasi atau kajian. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak Januari-Februari.

Disinggung mengenai SE Sekda Bantul, dia menilai PIK peningkatan kapasitas LKK tidak termasuk dalam penundaan. Sebab penundaan dilihat dari sumber pendanaannya. Berasal dari APBD daerah atau dana transfer pusat. "Kalau PIK itu tidak dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus (DAK)," klaimnya.

Sri Nuryanti menyebut, PIK peningkatan kapasitas LKK menggunakan dana pendapatan asli daerah atau sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Anggarannya disebut mencapai

Rp 225 juta. Menurutnya, atas dasar itu tidak termasuk dalam kriteria penundaan.

Dia menyebut, PIK peningkatan kapasitas LKK selama bulan ini digelar di sejumlah kalurahan. Terhitung sejak 3-14 Februari. "Pelaksanaan 13 dan 14 Februari kami batalkan," ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan dibatalkannya kegiatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Setda Bantul Trisna Manurung mengatakan, penundaan tersebut dikecualikan ketika pendanaan kegiatan bersumber dari DAK dan dana keistimewaan. **(rul/eno/rg)**